



ပိတိကိန္နရူပာပိကုသိကဏ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိနမိ ပိတိကိန္နရူပာပိကုသိကဏ်

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

ခံပိကိန္နရူပာပိကုသိကဏ်

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

လမ်းမူပိကုသိကဏ် ၅ နံပါတ် ၅၀၂၃၅၊ ဝင်္တပဏ် (၈၀၂၃၅)၊ တီလီဖုန်း (၀၃၆၁) ၂၄၉၈၀၅

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805

Laman : <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id>, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Tim Kera	: Umum dan Kepegawaian
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82,85 Nilai
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Hasil Kegiatan	: 100%
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

1. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

B. Gambaran Umum

Kendaraan dinas yang terdapat di DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) digunakan untuk operasional pada Sekretariat dan bidang-bidang di DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali. Kendaraan dinas yang digunakan dalam koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, memerlukan pemeliharaan guna dapat digunakan secara layak dan tidak mengganggu kenyamanan dalam perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dimaksud. Untuk itu dibutuhkan pemeliharaan yang efektif agar kendaraan tersebut berfungsi secara optimal lengkap dengan surat-surat yang dibutuhkan dalam operasional lalu lintas.

2. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah Sekretariat/Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas bekerjasama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang pertambangan sebagai penyedia pertamax dan dibidang perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

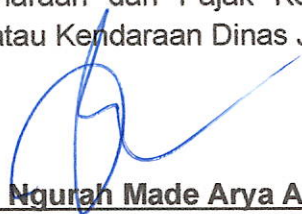
5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.098.383.428 (Satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Bali, 2 Januari 2025

Disiapkan oleh :

PPTK pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si

NIP. 19710601 199301 1 003

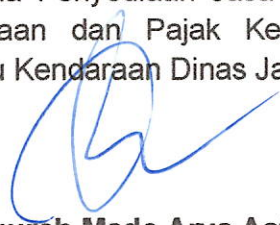
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Uraian	Pagu
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Spesifikasi : Pertamax	Rp. 441.585.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Spesifikasi : Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan	Rp. 33.000.000
3.	Belanja Jasa Tenaga Supir - Spesifikasi : Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi - Spesifikasi : THR Non ASN	Rp. 323.628.588 Rp. 9.000.000
4.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan - Spesifikasi : Pajak Kendaraan pada Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Bali	Rp. 18.000.000
5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 14.247.900
6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 776.736
7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 970.920
8.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN - Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 11.974.284
9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Spesifikasi : Kendaraan Roda 4/Sejenisnya	Rp. 234.000.000
10.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Spesifikasi : Kendaraan Roda 2/sejenisnya	Rp. 11.200.000

Bali, 2 Januari 2025

Disiapkan oleh :

PPTK pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si

NIP. 19710601 199301 1 003